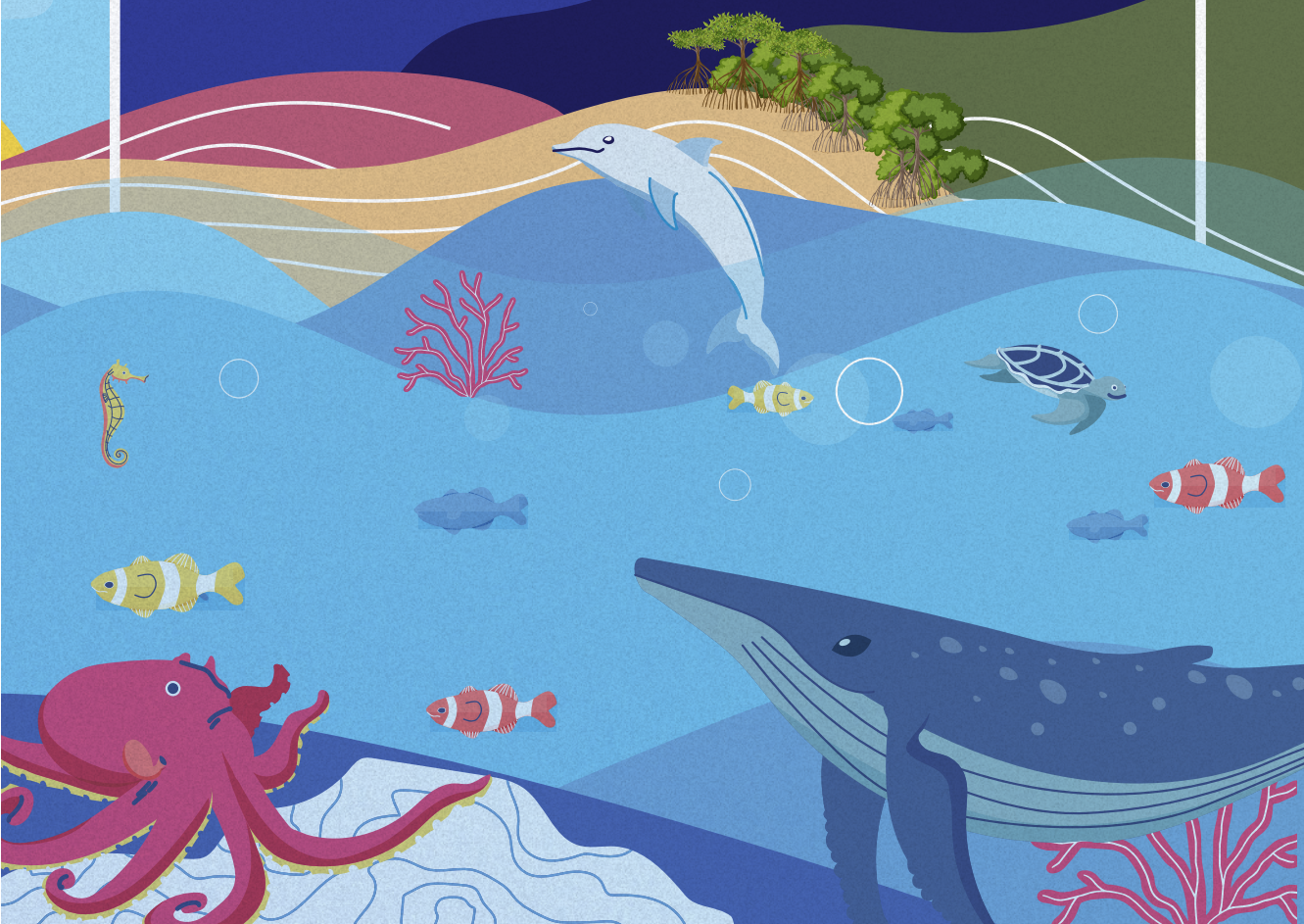




VISI KAWASAN KONSERVASI DAN OECD 2045:

Strategi Terpadu Menuju Laut Indonesia
Lestari dan Berkelanjutan

BUKU SAKU





VISI KAWASAN KONSERVASI dan OECM 2045:

Strategi Terpadu Menuju Laut Indonesia Lestari dan Berkelanjutan

Diterbitkan oleh:

© Kementerian Kelautan dan Perikanan
2025

Desain dan Tata Letak :

Mas'ud Wijaya

Dengan Dukungan:



Kontributor Foto :

Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara

Daftar isi

Pendahuluan.	2
Konsep dan Kebijakan Kawasan Konservasi	4
Sejarah dan Target Global	4
Capaian Nasional	5
Inovasi Kawasan Konservasi	6
Target dan Strategi Pencapaian	10
Target	10
Strategi Pencapaian Perluasan Kawasan Konservasi dan Potensi OECM untuk Mewujudkan Target 30x45	10
Analisis dan Perencanaan spasial potensi OECS Spasial OECS	14
Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi .	17
Bidang Kerja 1: Perencanaan, Program dan Penganggaran Terpadu	18
Bidang Kerja 2: Sumber Daya Manusia, Kompetensi dan Kapasitas	20
Bidang Kerja 3: Kerangka Hukum dan Peraturan	21
Bidang Kerja 4: Pemanfaatan Berkelanjutan di Kawasan Konservasi	24
Bidang Kerja 5: Pendanaan Berkelanjutan	27
Bidang Kerja 6: Upaya Konservasi Berbasis Kawasan yang Efektif Lainnya - OECS	29
Bidang Kerja 7: Platform Komunikasi dan Sosialisasi	30
Penutup.....	32

- Luasan ekosistem di Indonesia
- Jumlah jenis di Indonesia
- Proporsi Indonesia di dunia

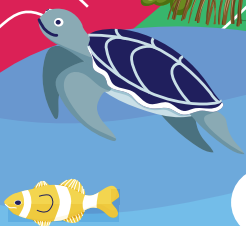


Mangrove

3.364.769 ha

43

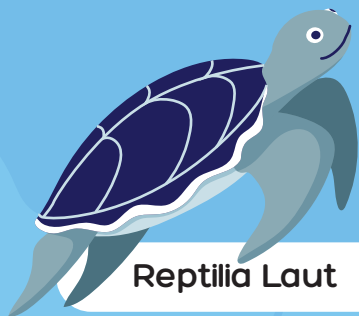
60,6%



Polychaeta

580

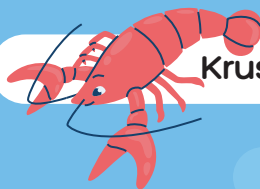
5,06%



Reptilia Laut

52

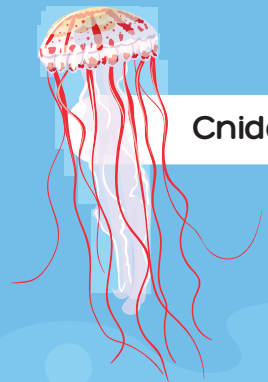
56,52%



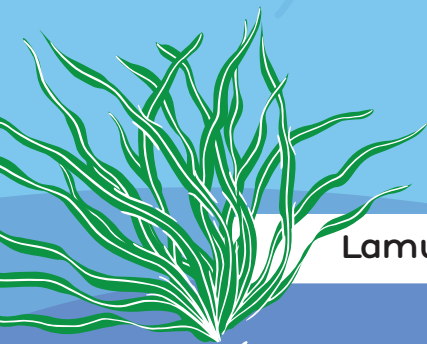
Krustasea Laut

1.869

3,12%



Cnidaria

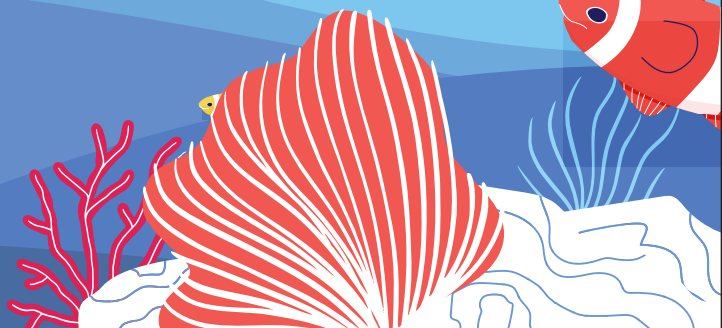


Lamun

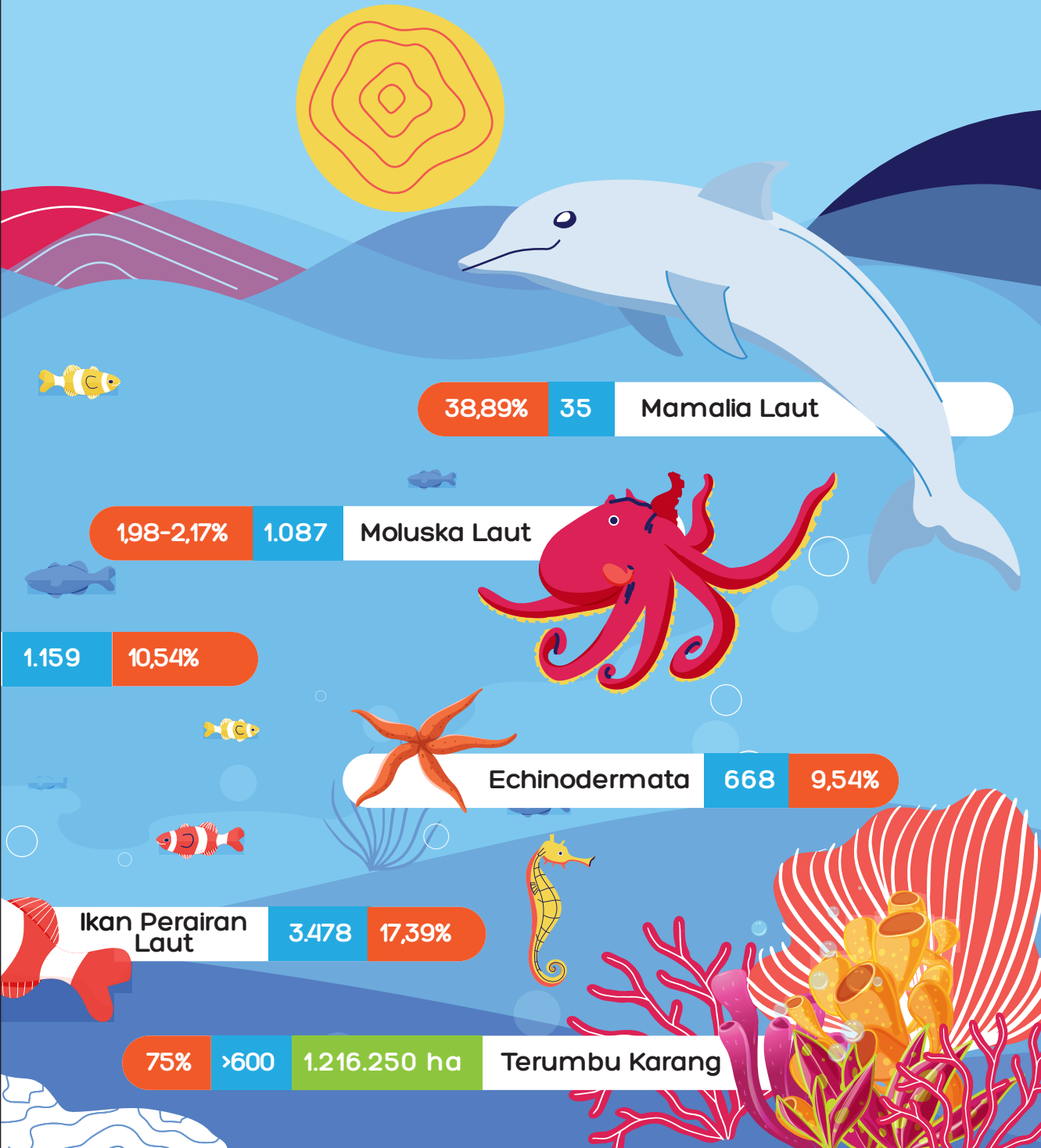
273.951 ha

16

22,2%



Kekayaan Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia



PENDAHULUAN

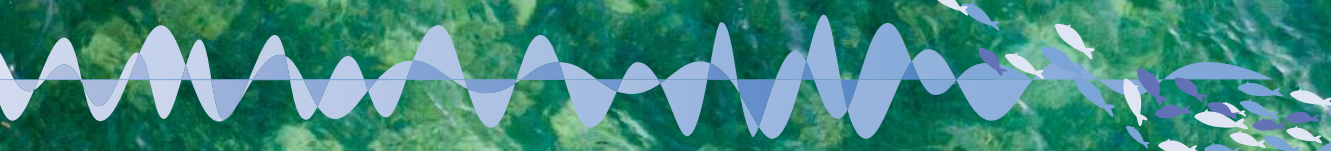
LATAR BELAKANG

Indonesia adalah representasi mini sempurna planet bumi dengan perairan laut yang mengelilingi pulau-pulau. Kekayaan keanekaragaman hayati lautnya mencakup berbagai spesies biota laut dan tiga ekosistem utama pesisir. Namun, keanekaragaman hayati laut tersebut terancam oleh eksploitasi sumber daya berlebih, praktik pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan, degradasi ekosistem pesisir dan perubahan iklim. Oleh karena itu, perlindungan dan pemanfaatan sumber daya hayati laut secara berkelanjutan sangat diperlukan, termasuk melalui pembentukan kawasan konservasi pesisir dan laut.

Sebagai negara yang meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB, Indonesia berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi Konvensi. Salah satu rekomendasi terbaru adalah Target 3 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal, yang bertujuan

melindungi 30% laut dunia pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan OECM. Pada Our Ocean Conference ke-9 di Athena, Pemerintah Indonesia berkomitmen memperluas kawasan konservasi pesisir dan laut hingga 30% atau 97,5 juta hektar pada tahun 2045, dikenal sebagai Visi 30x45.

Dokumen MPA dan OECM Vision 2045 disusun sebagai panduan strategis untuk mencapai Target 30x45, melindungi keanekaragaman hayati, kepentingan perikanan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta pengelolaan laut berkelanjutan bagi generasi sekarang dan mendatang. Dari tahun 2022 hingga 2025, Indonesia mengadakan lokakarya dengan melibatkan para ahli dari berbagai sektor untuk mengembangkan MPA dan OECM Vision 2045, dipimpin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan melibatkan Mitra utama termasuk beberapa LSM, Universitas dan Pakar Konservasi Laut.



TUJUAN

Dokumen ini disusun sebagai panduan strategis untuk mencapai target pada tahun 2045, di mana 30% atau 97,5 juta hektar luasan pesisir dan laut Indonesia disisihkan untuk kebutuhan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan serta peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan.

PELAKSANAAN

Rencana ini akan ditinjau dan diperbarui setiap lima tahun untuk menyesuaikan dengan perubahan dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir.



KONSEP DAN KEBIJAKAN KAWASAN KONSERVASI

SEJARAH DAN TARGET GLOBAL

TARGET 30X30



Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Pasca-2020 Target 3 memasukkan rencana ambisius untuk melindungi 30% laut sejagad pada 2030 melalui jejaring Kawasan Konservasi Laut dan Upaya Konservasi berbasis-luasan Efektif Lain, untuk mendorong pencapaian apa yang disebut dengan "Global Goal for Nature: Nature Positive by 2030". **Indonesia memiliki Target 30x45 sebagai manifestasi Target 30x30 global, yaitu menyisihkan 30% atau 97,5 juta ha pesisir dan laut Indonesia untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan.**

TARGET 10X10



Konvensi Keanekaragaman Hayati meminta kepada negara-negara peratifikasi **"mendirikan sistem kawasan perlindungan nasional dan regional yang komprehensif, dikelola efektif dan representatif secara ekologis, serta konservasi efektif bagi paling tidak 10% dari setiap ekoregion bumi pada 2010"**



TARGET 10X20

Aichi Biodiversity Targets: Target#11

"pada 2020, ... paling tidak 10% wilayah pesisir dan laut, terutama wilayah-wilayah penting bagi keanekaragaman hayati dan jasa-jasa ekosistem, dikonservasi melalui sistem kawasan perlindungan dan upaya konservasi berbasis-luasan efektif lain yang terhubung-baik, dikelola secara efektif dan adil, representatif secara ekologis, dan terintegrasi ke dalam bentang-lahan dan bentang-laut yang lebih luas"

CAPAIAN NASIONAL

2020

Indonesia berhasil mendirikan kawasan konservasi seluas **23,1 juta ha atau sekitar 7,1%** dari luas keseluruhan laut Indonesia

2023

Indonesia berhasil mendirikan kawasan konservasi di perairan seluas **29,3 juta ha atau sekitar 9%** dari luas keseluruhan laut Indonesia

2015

Indonesia berhasil mendirikan kawasan konservasi di perairan seluas **17,3 juta ha atau sekitar 5,3%** dari luas keseluruhan laut Indonesia

2007

Indonesia berhasil mendirikan kawasan konservasi di perairan seluas **6,6 juta ha atau sekitar 2%** dari luas keseluruhan laut Indonesia

1970

Indonesia telah melakukan konservasi keanekaragaman hayati laut berbasis-luasan

INOVASI KAWASAN KONSERVASI

Strategi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 dibangun untuk menjawab tantangan ekonomi dan perubahan iklim, sekaligus mendukung perundangan nasional dan komitmen Indonesia di tingkat global. Strategi ini bertujuan mencapai tiga tujuan utama:

1. Perlindungan Keanekaragaman Hayati Laut
2. Perikanan Berkelanjutan
3. Adaptasi Perubahan Iklim (Karbon Biru)

Adapun inovasi Kawasan konservasi yang didorongkan melalui Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 ini adalah sebagai berikut:

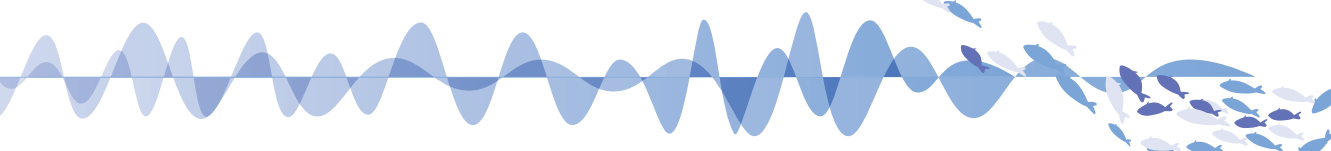
1. Kawasan Konservasi untuk Keanekaragaman Hayati

Perlindungan keanekaragaman hayati laut sangat penting untuk berbagai aspek, termasuk kesehatan ekosistem, mendukung perikanan, ketahanan pangan, manfaat ekonomi melalui sektor

pariwisata dan bioteknologi, serta menjaga nilai budaya dan spiritual masyarakat pesisir. Perlindungan keanekaragaman hayati laut berfokus pada spesies focal yaitu spesies karismatik, spesies kunci, indikator, flagship yang akan berdampak pada kelestarian habitat dan ekosistem secara keseluruhan. Selain itu kawasan konservasi ini juga mendorong konservasi spesies beruaya jauh dan melintasi yurisdiksi negara yang memerlukan upaya perlindungan regional dan global.

2. Kawasan Konservasi untuk Perikanan Berkelanjutan

Salah satu tujuan pengembangan kawasan konservasi di Indonesia adalah kelestarian sumber daya ikan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Perikanan berkelanjutan penting untuk memastikan keberlanjutan stok ikan yang mendukung produktivitas jangka panjang, ketahanan pangan, penyediaan sumber protein bagi jutaan orang, dan mendukung pembangunan ekonomi melalui



ketersediaan lapangan kerja. Strategi pemanfaatan sumber daya di dalam kawasan konservasi mencakup perikanan tangkap berkelanjutan, budidaya perikanan, dan peningkatan stok ikan melalui model perikanan berbasis budidaya.

Konservasi berbasis perikanan berlaku untuk komoditas perikanan di perairan dekat pantai, lepas pantai yang meliputi perairan teritorial dan zona ekonomi eksklusif (ZEE). Pendirian kawasan konservasi untuk mendukung keberlanjutan sumber daya ikan memerlukan perancangan yang kuat, terutama untuk ikan pelagis. Sebagian prioritas kawasan konservasi baru berada di atas 12 mil laut, dengan target pengelolaan untuk keberlanjutan ikan pelagis. Hal tersebut tentu membutuhkan inovasi dalam pemetaan wilayah penting yang dipengaruhi oleh fitur oseanografi.

3. Kawasan Konservasi untuk Adaptasi Perubahan Iklim

Karbon biru adalah karbon yang tersimpan di ekosistem pesisir dan

laut, seperti mangrove dan padang lamun, yang mampu menyerap CO₂ dalam jumlah besar, sehingga dapat membantu mengurangi laju perubahan iklim. Selain itu, ekosistem ini juga melindungi pantai dari erosi dan badai. Dalam strategi perluasan kawasan konservasi menuju 30%, ekosistem karbon biru menjadi indikator utama, dimana Pengelolaan yang efektif diharapkan mampu melindungi ekosistem karbon biru, mendukung mitigasi perubahan iklim, dan mendorong praktik baik seperti perikanan berkelanjutan. Selain itu, kawasan konservasi juga didorong untuk membantu masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim dengan menjaga jasa ekosistem seperti penyediaan pangan dan perlindungan area pesisir dari badai laut yang intens.

4. Other Effective area-based Conservation Measures (OECM)

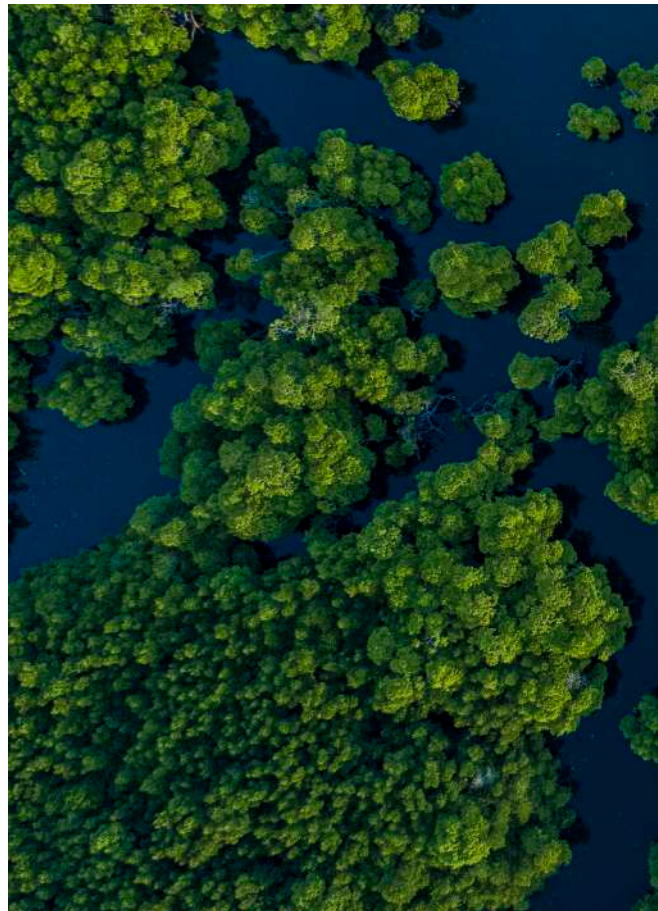
OECM adalah upaya konservasi berbasis kawasan yang efektif di luar yurisdiksi kawasan konservasi, dikelola oleh masyarakat atau pihak non-pemerintah. Istilah ini pertama kali dikenal dalam Aichi

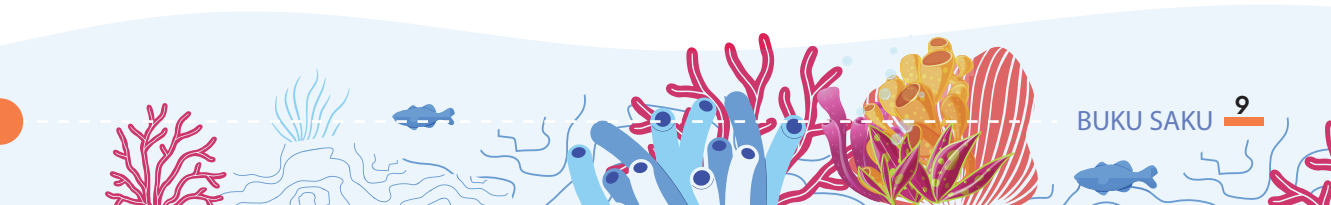
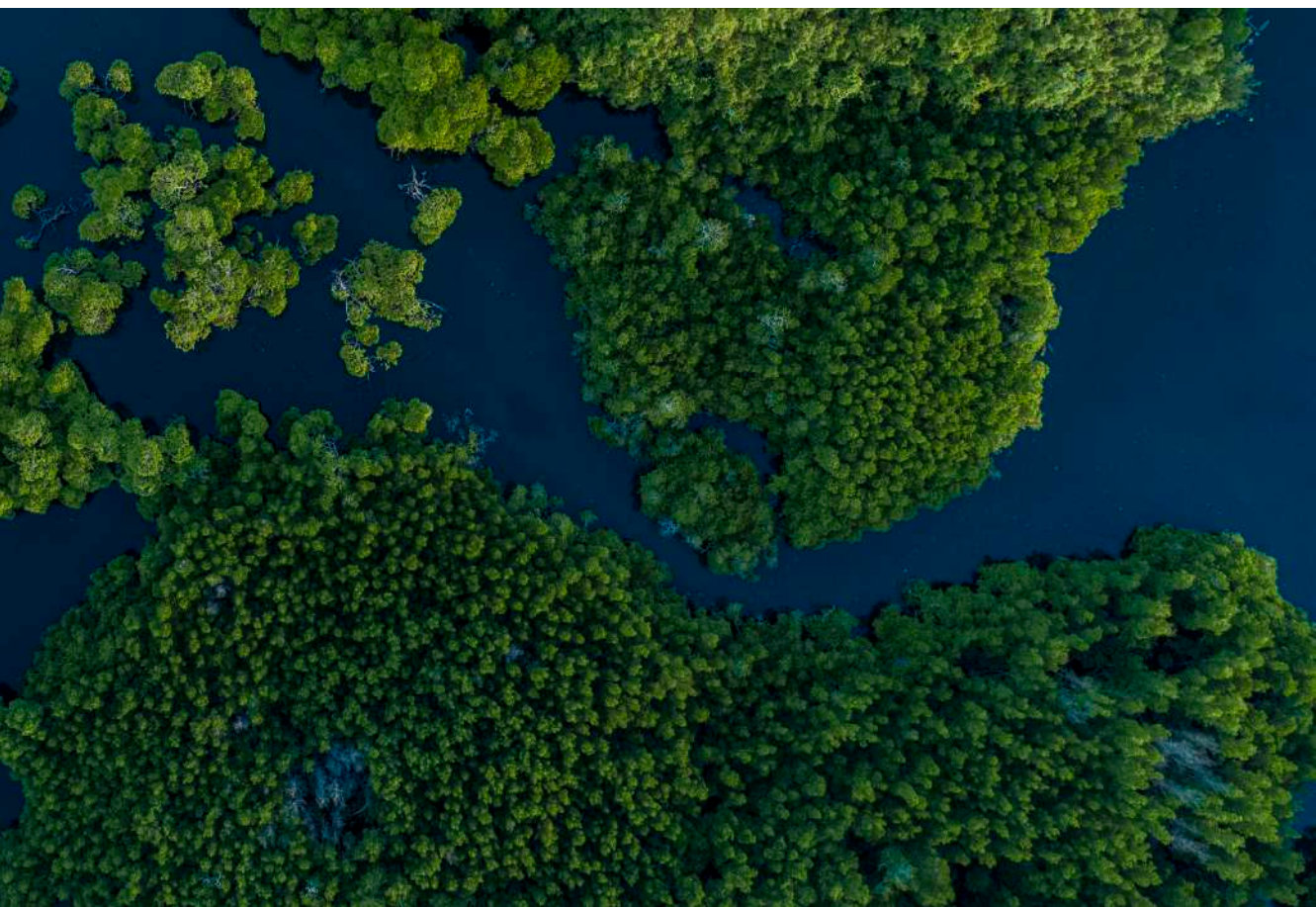
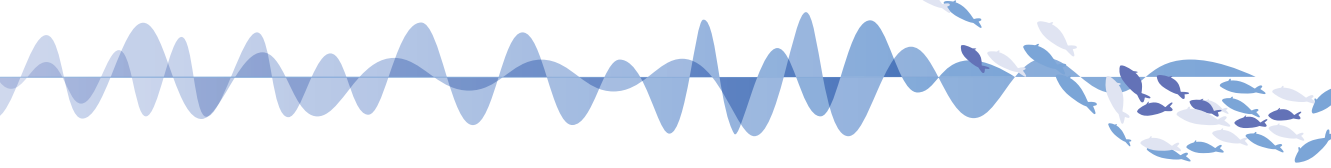


Target 11 pada pertemuan CBD 2010, yang menyatakan bahwa pada 2020, 10% wilayah pesisir dan laut harus dikonservasi melalui sistem kawasan perlindungan dan OECM.

berbasis masyarakat lainnya, yang juga dapat menjadi potensi OECM. Berdasarkan studi terkini, potensi OECM di Indonesia mencapai 10,2 juta hektar atau setara dengan 3% dari target 30%.

OECM dianggap memberikan dampak signifikan dan menjadi salah satu pendekatan inovatif dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Di Indonesia OECM, didefinisikan sebagai kawasan perairan darat, pesisir dan pulau-pulau kecil, perairan pesisir, lepas pantai, laut dalam yang secara geografis berada di luar kawasan konservasi, dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, swasta dan/atau masyarakat dengan menggunakan tata kelola yang memberikan dampak konservasi secara ekologis, keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi, dan/atau budaya. Masyarakat Hukum Adat (MHA) dapat menjadi potensi OECM di Indonesia, meskipun demikian ada banyak model ekosistem pesisir





TARGET DAN STRATEGI PENCAPAIAN

TARGET

Terdapat dua target utama yang ingin dicapai dalam Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045, yaitu:

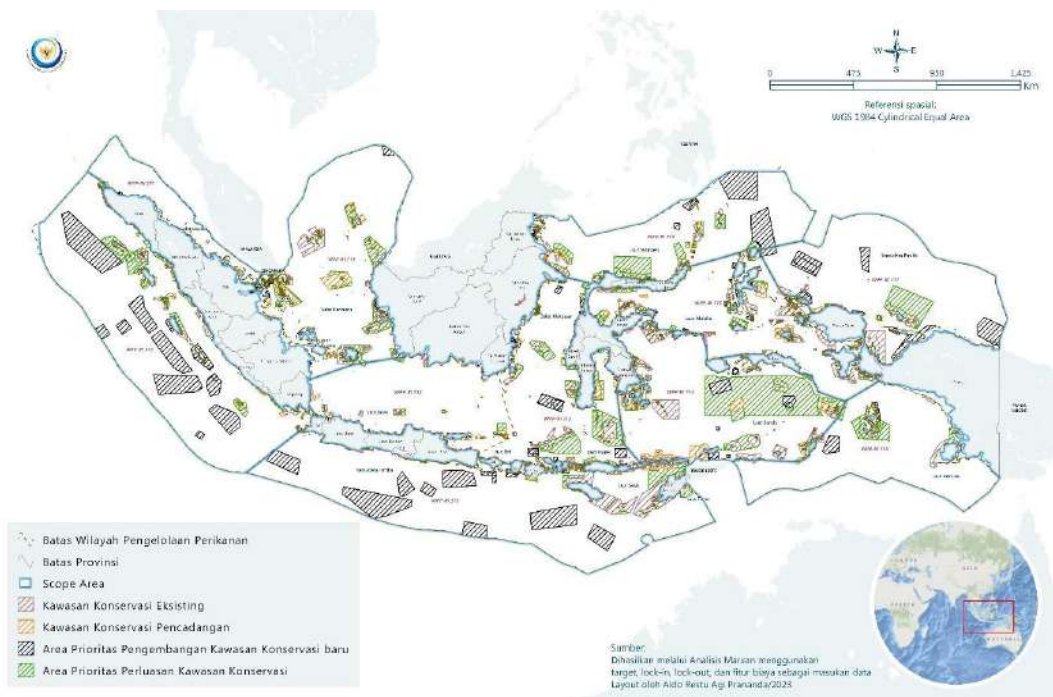
1. Peningkatan luasan kawasan konservasi hingga **97,5 juta ha** dengan keterwakilan ekosistem penting.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk mencapai status dikelola secara berkelanjutan pada tahun 2045.



STRATEGI PENCAPAIAN PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI DAN POTENSI OECDM UNTUK MEWUJUDKAN TARGET 30X45

ANALISIS DAN PERENCANAAN SPASIAL UNTUK PERLUASAN KAWASAN KONSERVASI

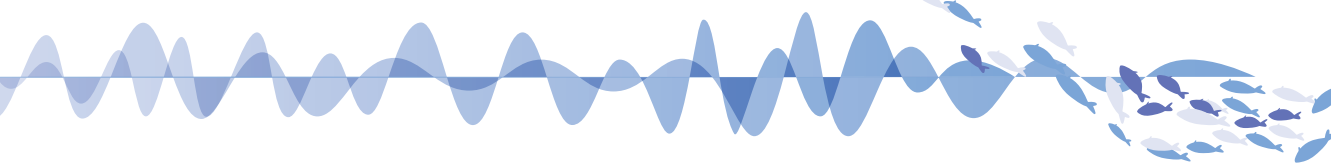
Untuk mencapai **Target 30x45** terkait penambahan luasan kawasan konservasi, proses perancangan spasial dilakukan melalui lima tahapan utama: Pengumpulan data; Analisis awal perancangan spasial; Konsultasi dengan pakar; Konsultasi dengan pemerintah daerah; Finalisasi perancangan spasial. Potensi perluasan kawasan konservasi (KK) yang ada dan yang akan didirikan hingga 2045 mencapai 86.880.542 ha. 40.704.375 ha dicapai dengan melakukan perluasan dari kawasan konservasi yang telah ada, dan 46.176.169 ha dicapai dengan pengembangan kawasan konservasi baru.



Gambar 2. Area prioritas bagi pengembangan dan perluasan kawasan-kawasan konservasi perairan/laut di seluruh Indonesia

Tabel 1. Area Prioritas dan Peta Jalan Perluasan Kawasan Konservasi (KK) dan Pengembangan KK Baru Menuju Konservasi 30% Luasan Perairan Indonesia pada 2045, Dibagi Berdasarkan Zona Penangkapan Ikan Terukur.

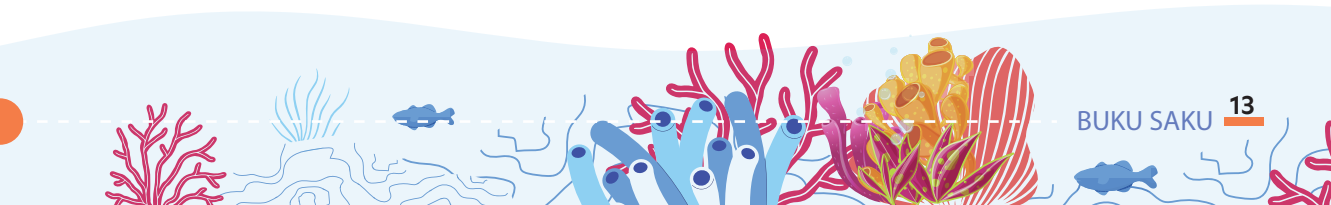
Area Prioritas	Periode	Zona						TOTAL
		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	
Perluasan Kawasan Konservasi yang Ada	1 (2023-2030)	406.742	5.009.372	4.097.762	1.406.495	29.058	171.327	11.120.756
	2 (2031-2035)	1.599.808	187.223	2.464.613	1.356.514	6.688	1.212.175	6.827.021
	3 (2036-2040)	905.363	815.971	2.408.691	1.971.561	-	517.119	6.618.705
	4 (2041-2045)	263.785	1.251.024	11.344.715	691.847	-	2.586.522	16.137.893
Sub Total		3.175.698	7.263.591	20.315.781	5.426.417	35.746	4.487.142	40.704.375
Pengembangan Kawasan Konservasi Baru	1 (2023-2030)	-	2.137.647	855.932	727.795	-	148.854	3.870.228
	2 (2031-2035)	31.021	6.359.940	312.460	4.551.585	28.974	316.974	11.319.740
	3 (2036-2040)	171.509	2.588.170	72.084	1.288.291	7.918	1.393.109	5.521.081
	4 (2041-2045)	644.449	948.399	1.756.482	21.650.474	8.196	175.906	25.183.906
Sub Total		846.979	12.034.156	2.996.958	28.218.145	45.089	2.034.842	46.176.169
Total		4.022.676	19.297.746	23.312.739	33.644.562	80.835	6.521.984	86.880.542



Selain dibagi berdasarkan zona penangkapan ikan terukur, area priortitas perluasan Kawasan konservasi juga dikelompokkan berdasarkan tiga tujuan utama (tema), yaitu untuk (a) perlindungan keanekaragaman hayati laut, (b) perikanan berkelanjutan, dan (c) adaptasi perubahan iklim (Tabel 2).

Tabel 2. Area Prioritas Pengembangan KK Tematik Menuju Konservasi 30% Luasan Perairan Indonesia pada 2045, Dibagi Berdasarkan Zona Penangkapan Ikan Terukur

Zona	Luasan Kawasan Konservasi Tematik (Ha)		
	Keanekaragaman Hayati	Perikanan Berkelanjutan	Adaptasi Perubahan Iklim
Zona 1	11.647.500	11.252.500	8.109.000
Zona 2	11.210.000	10.067.500	3.966.500
Zona 3	26.490.000	26.490.000	13.080.500
Zona 4	13.715.000	14.265.000	4.579.000
Zona 5	1.165.000	1.157.500	584.500
Zona 6	10.987.500	11.407.500	1.923.500
Total	75.215.000	74.640.000	32.243.000

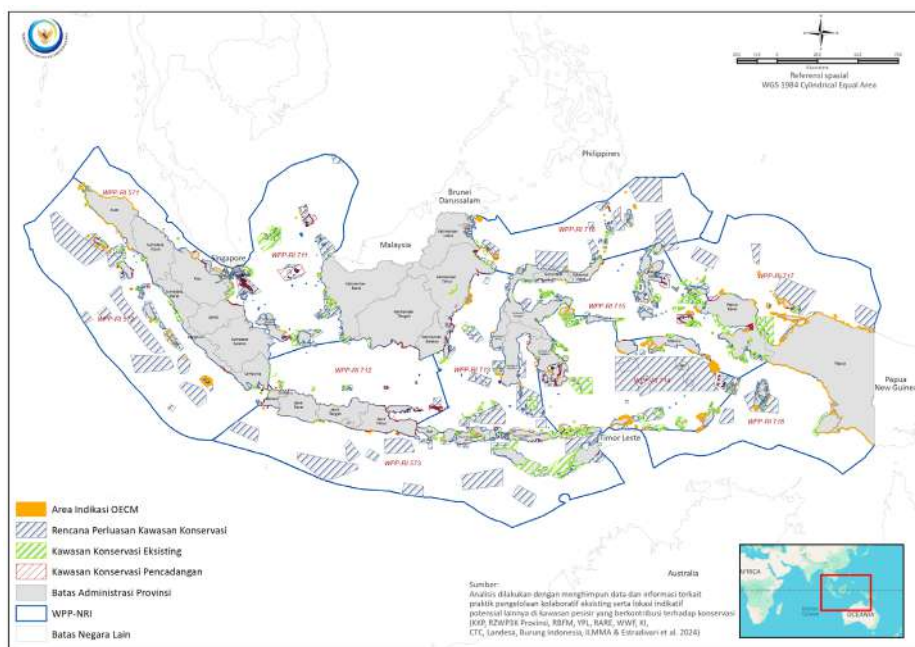


ANALISIS DAN PERENCANAAN SPASIAL POTENSI OECD SPASIAL OECD

Identifikasi lokasi potensial OECD didasarkan pada kriteria yang mengacu pada definisi dan kriteria OECD global, yakni: 1) berada di luar kawasan konservasi formal yang ditetapkan oleh pemerintah, 2) memiliki kelembagaan, aturan dan tata kelola, 3) memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, dan 4) berdampak sosial, ekonomi dan budaya. Masing-masing lokasi kemudian diklasifikasikan berdasarkan hasil skoring menjadi dua kategori utama yakni: 1) "Kandidat OECD", dan 2) "Berpotensi OECD".

Total unit calon OECD yang diidentifikasi adalah 650 unit yang dapat diimplementasikan dalam dua periode:

1. 199 unit (2025-2030) - Kandidat OECD
2. 451 unit (2031-2045) - Berpotensi OECD



Gambar 3. Area prioritas bagi pengembangan dan implementasi OECD perairan di Indonesia.



Selain dibagi berdasarkan zona penangkapan ikan terukur, area potensi OECM juga dikelompokkan berdasarkan tiga tujuan utama konservasi (tema), yaitu: (a) perlindungan keanekaragaman hayati laut, (b) perikanan berkelanjutan, dan (c) adaptasi perubahan iklim (Tabel 5).

Tujuan pengelolaan dari OECM sejatinya cukup beragam sesuai kesepakatan bersama, yg mana kemudian coba dikelompokkan dan diharmonisasikan dengan tiga target utama konservasi laut Indonesia di atas.

Tabel 5. Area Potensial Implementasi OECM Tematik yang Berkontribusi dalam Mencapai Visi Kawasan Konservasi 30x45 Berdasarkan pada Zona Penangkapan Ikan Terukur.

Zona PIT	Potensi Tematik OECM		
	Adaptasi Perubahan Iklim	Keanekaragaman Hayati	Perikanan Berkelanjutan
Zona 1	324,949.30	102,953.31	444,245.67
Zona 2	23,948.94	947,179.92	2,315,843.39
Zona 3	452,587.09	1,051,764.00	3,965,155.82
Zona 4	43,606.50	732,937.70	1,125,677.25
Zona 5	72,551.33	10,093.31	87,280.60
Zona 6	258,631.20	53,449.38	432,671.89
Total (Ha)	1,176,274.36	2,898,377.63	8,370,874.62



STRATEGI PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI

Strategi peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi mengacu pada MPA Vision 2030 yang telah ditinjau oleh beberapa LSM mitra pemerintah, praktisi konservasi dan akademisi. Sama halnya dengan MPA Vision 2030, strategi pencapaian dibagi ke dalam tujuh bidang kerja (BK) berbeda yaitu: 1) perencanaan, program dan penganggaran terpadu; 2) sumber daya manusia, kompetensi, dan kapasitas; 3) kerangka hukum dan peraturan; 4) pemanfaatan berkelanjutan; 5) pembiayaan berkelanjutan; 6) OECM; dan 7) platform komunikasi dan penjangkauan.



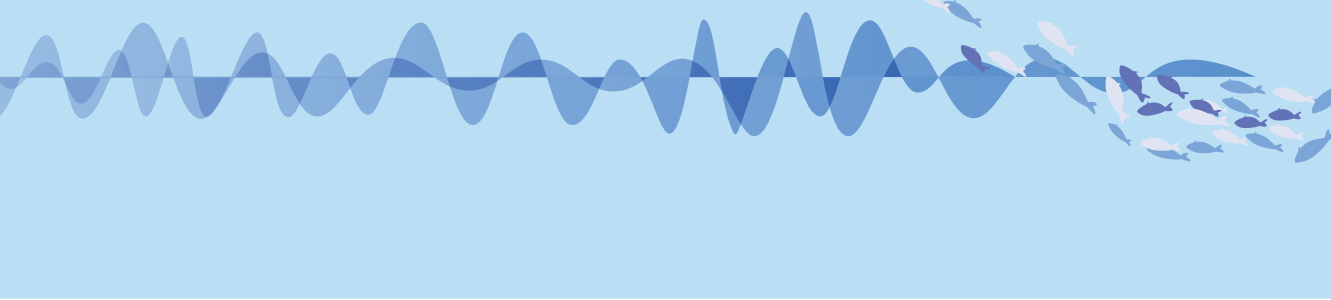
BIDANG KERJA 1 : PERENCANAAN, PROGRAM DAN PENGANGGARAN TERPADU

Bidang kerja 1 bertujuan untuk menciptakan pendekatan terpadu yang mencakup aspek kebijakan, perencanaan, penganggaran, kelembagaan, dan sistem pemantauan dengan target yang ingin dicapai adalah:

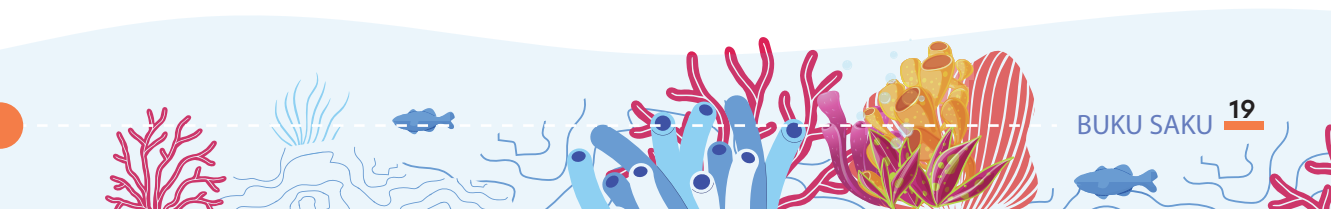
- a. Penyelarsan Kebijakan dan Regulasi.
- b. Penyusunan Perencanaan terpadu.
- c. Integrasi Sistem Penganggaran.
- d. Penguatan kelembagaan unit Pengelola Kawasan Konservasi.
- e. Penguatan Sistem Pemantauan dan Evaluasi.

Langkah strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:

1. Formalisasi tujuan dan sasaran MPA dan OECM Vision melalui RPJMN.
2. Pengembangan mekanisme koordinasi antar K/L nasional utama dalam perencanaan dan penganggaran untuk mencapai target RPJMN.
3. Melakukan sinkronisasi kebijakan lintas K/L secara berkala.
4. Pelibatan setiap perwakilan dari pemerintah provinsi, lembaga regional, dan mitra pembangunan dalam proses perencanaan nasional.
5. Pembentukan dan pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif menjadi kinerja utama (IKU) Gubernur. Pemerintah Pusat dapat memperkuat komitmen ini melalui mekanisme insentif anggaran, seperti Dana Insentif Daerah (DID) atau skema khusus dalam Dana Alokasi Khusus (DAK).
6. Pengintegrasian target nasional Kawasan Konservasi ke dalam RPJPD dan RPJMD setiap provinsi, untuk memastikan perencanaan dan penganggaran kegiatan KK tercermin dalam dokumen perencanaan terkait (Renstra dan RKPD OPD).
7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terpadu Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD) di setiap provinsi.
8. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk memperkuat integrasi dan sinkronisasi perencanaan dan



- penganggaran Kawasan Konservasi pada tingkat provinsi.
9. Pengembangan pengelolaan kolaboratif melalui kemitraan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang efektif oleh pemerintah provinsi.
 10. Pembentukan satuan unit organisasi pengelola pada setiap Kawasan Konservasi di provinsi serta peta jalan penguatan kelembagaan pengelola Kawasan Konservasi.
 11. Penyusunan strategi perencanaan, program, dan penganggaran sebagai rujukan untuk pengembangan kapasitas SDM pengelola konservasi.
 12. Penguatan sistem data dan informasi terkait kawasan konservasi secara nasional dengan data yang faktual dan pembaharuan secara berkala.
 13. Peninjauan dan revisi Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika) dengan memasukkan indikator neraca sumber daya laut (NSDL).
 14. Peninjauan dan revisi peraturan dan pedoman pembentukan dan pengelolaan Kawasan Konservasi yang efektif di Indonesia.



BIDANG KERJA 2 : SUMBER DAYA MANUSIA, KOMPETENSI DAN KAPASITAS

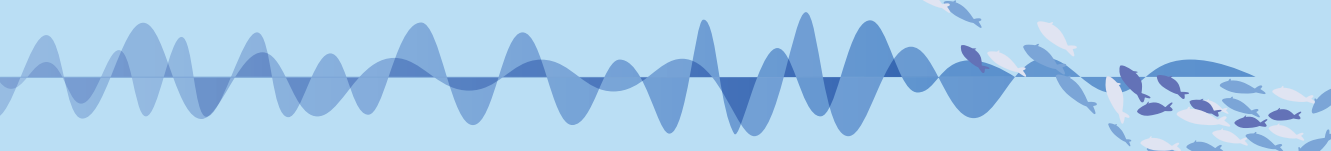
Bidang kerja 2 memiliki tujuan untuk membangun Struktur kepegawaian dan ketersediaan SDM yang kompeten bagi pengelolaan Kawasan Konservasi (KK) yang efektif; menyusun mekanisme untuk meningkatkan perekrutan dan retensi SDM KK; serta pengembangan kompetensi bagi SDM KK dan para pemangku kepentingan terkait. Target yang ingin dicapai adalah:

- a. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan uji kompetensi untuk pemenuhan kebutuhan prioritas kawasan konservasi dan OECM.
- b. Penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi Konservasi dan Jasa Kelautan (LSP KJK) untuk memastikan skema-skema kompetensi guna mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi dan Profesi (BNSP).
- c. Penguatan peran perguruan tinggi dalam pengembangan kapasitas pengelola kawasan dan masyarakat.
- d. Tercantumnya kegiatan pengembangan kapasitas unit-unit pengelola dalam dokumen

rencana pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk mencapai target tersebut langkah strategi yang harus dilakukan adalah:

1. Penyelenggaraan pelatihan yang menunjang uji kompetensi untuk memenuhi kebutuhan prioritas kawasan konservasi perairan.
2. Penguatan LSP KJK untuk memastikan tersedianya skema-skema kompetensi guna mendapatkan lisensi dari BNSP.
3. Penyelenggaraan uji-uji kompetensi.
4. Penguatan peran serta perguruan tinggi dalam mengembangkan kapasitas pengelola kawasan konservasi dan masyarakat.
5. Pencantuman kegiatan pengembangan kapasitas unit-unit pengelola kawasan konservasi dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan.



BIDANG KERJA 3 : KERANGKA HUKUM DAN PERATURAN

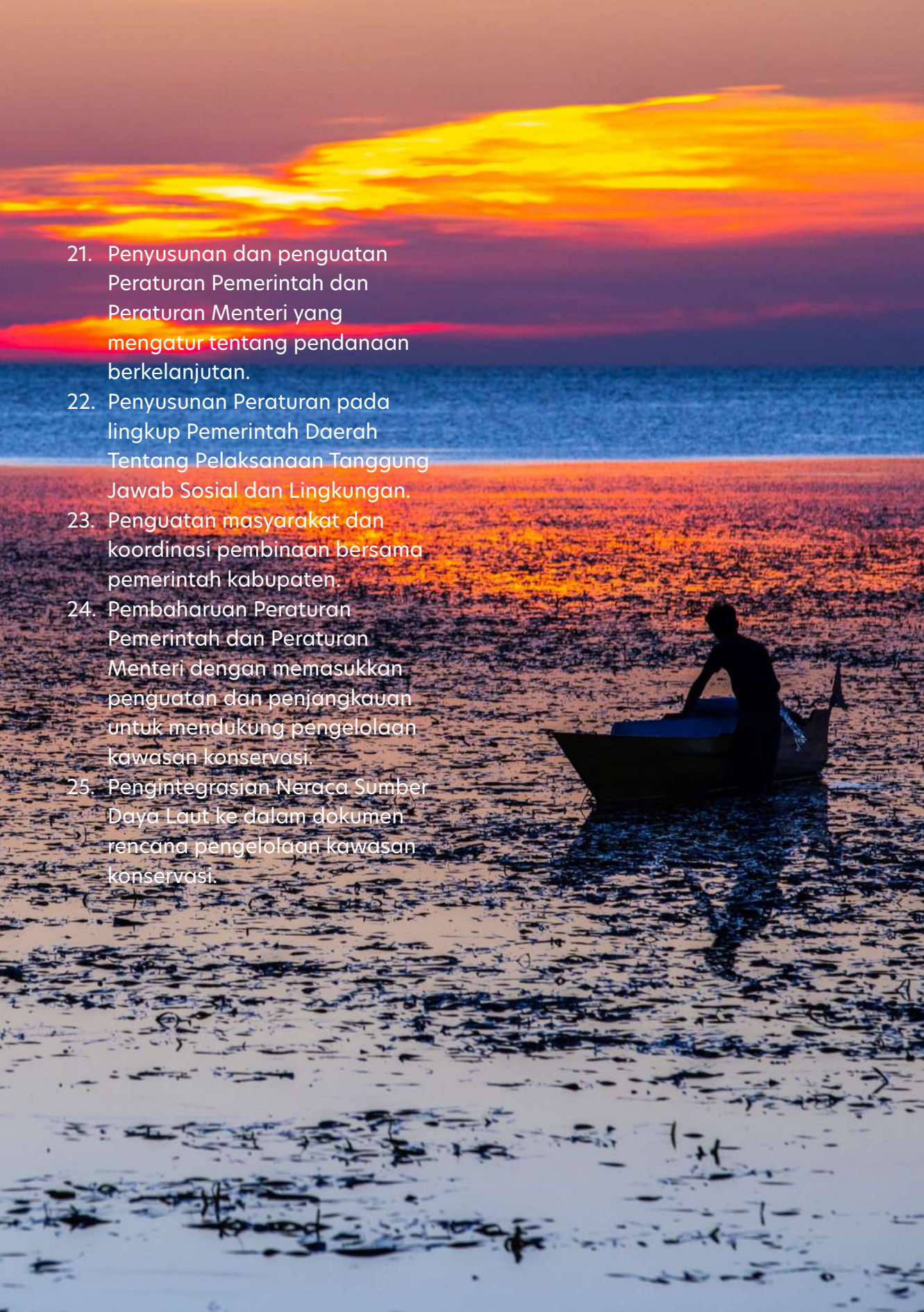
Bidang kerja 3 bertujuan untuk membangun kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk mendorong pengelolaan kawasan konservasi yang efektif. Target yang ingin dicapai adalah:

- a. Integrasi RZWP3K dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Integrasi tata kelola Kawasan Konservasi sesuai UU Perikanan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Kelautan.
- c. Pengelolaan Kawasan Konservasi Hutan pasca penyerahan delapan Kawasan Konservasi dari KLHK tahun 2009.
- d. Pengawasan terpadu di dalam Kawasan Konservasi.
- e. Forum koordinasi antar pihak yang lebih baik.
- f. Platform kemitraan multi pihak dalam pengelolaan kawasan.
- g. Penyesuaian persentase luasan perlindungan ekosistem.
- h. Pertimbangan memasukkan OECD dalam rezim konservasi.
- i. Penguatan masyarakat dan koordinasi pembinaan bersama pemerintah kabupaten.
- j. Tercantumnya Neraca Sumber Daya Laut (NSDL) sebagai alat evaluasi tambahan pengelolaan kawasan konservasi.

Untuk mencapai target tersebut langkah strategi yang harus dilakukan adalah:

1. Penguatan landasan hukum tentang Tata Ruang Wilayah termasuk RZWP3K/ Materi Teknis Perairan dan Pesisir.
2. Peninjauan terhadap kebijakan pengelolaan kawasan konservasi seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 tahun 2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.
3. Penyebarluasan kebijakan terbaru termasuk Permen KP 28 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut.
4. Integrasi Neraca Sumber Daya Laut dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan termasuk di daerah.
5. Nasional workshop penyusunan Panduan Teknis (SOP) Integrasi Neraca Sumber Daya Laut dalam perencanaan pembangunan daerah.

6. Membangun landasan hukum dan Kebijakan yang lebih kuat dan terkini bagi pengelolaan Kawasan Konservasi dari aspek perikanan dan pariwisata.
7. Lokakarya tingkat nasional, untuk pengkajian isu dan kesenjangan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan dan pengawasan kawasan konservasi dari aspek perikanan dan pariwisata.
8. Pengkajian hukum dan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.
9. Penguatan kewenangan pengelolaan kawasan konservasi hutan pasca pengelolaan KLHK.
10. Konsolidasi lintas pemangku kepentingan tingkat Nasional dan Provinsi untuk pengkajian kebijakan pengelolaan kawasan konservasi.
11. Memastikan proses penetapan/ pengelolaan kawasan konservasi (usulan) sesuai dengan hukum dan kebijakan.
12. Penguatan kebijakan pengawasan dalam kawasan konservasi.
13. Pengkajian kebijakan pengawasan dalam kawasan konservasi baik di daerah maupun nasional.
14. Pengembangan standar teknis pelaksanaan pengawasan terpadu dalam kawasan konservasi.
15. Lokakarya tingkat provinsi untuk penyusunan rencana aksi pengawasan terpadu dalam kawasan konservasi.
16. Penyusunan Panduan Teknis (SOP) pengawasan terpadu dalam kawasan konservasi antara PSDKP dan pemerintah provinsi.
17. Pengintegrasian rencana aksi pengawasan terpadu dengan rencana pengelolaan kawasan konservasi.
18. Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (Siswasmas) dalam kawasan konservasi.
19. Pengembangan program-program implementasi Siswasmas dalam kawasan konservasi diakomodir ke dalam rencana pembangunan daerah kabupaten/desa.
20. Penguatan dan penyusunan kebijakan kemitraan/ kolaborasi pengelolaan (co-management) dalam kawasan konservasi multi pihak.

- 
- A person is seen from behind, sitting in a small wooden boat on a body of water. The sun is setting, creating a vibrant orange and yellow glow across the sky and reflecting on the water's surface. The person's silhouette is dark against the bright background. The water shows gentle ripples and the reflection of the boat and the person.
21. Penyusunan dan penguatan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang pendanaan berkelanjutan.
 22. Penyusunan Peraturan pada lingkup Pemerintah Daerah Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 23. Penguatan masyarakat dan koordinasi pembinaan bersama pemerintah kabupaten.
 24. Pembaharuan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri dengan memasukkan penguatan dan penjangkauan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.
 25. Pengintegrasian Neraca Sumber Daya Laut ke dalam dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi.

BIDANG KERJA 4 : PEMANFAATAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN KONSERVASI

Bidang kerja 4 memiliki tujuan untuk melakukan identifikasi masalah, penanganan dampak, dan penguatan mekanisme pemanfaatan berkelanjutan di kawasan konservasi, dengan menjaga keanekaragaman hayati laut-pesisir dan jasa ekosistem terkait. Pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan meliputi empat kategori utama yaitu Penangkapan ikan berkelanjutan; Budi daya ikan berkelanjutan; Wisata bahari yang berkelanjutan; dan Penelitian dan pendidikan. Target yang ingin dicapai antara lain:

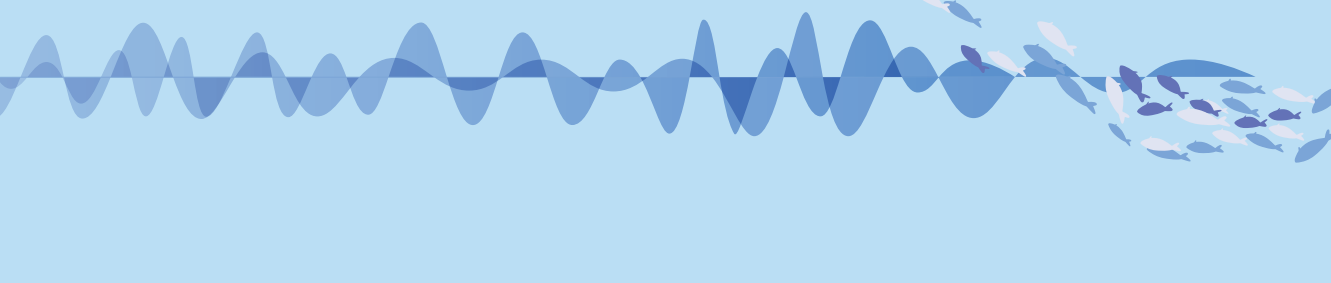
- a. Pemanfaatan sumber daya hayati laut dan jasa ekosistem sesuai dengan kapasitas ekologis kawasan.
- b. Efektivitas pengelolaan dan kepatuhan terhadap peraturan pemanfaatan di kawasan konservasi meningkat.

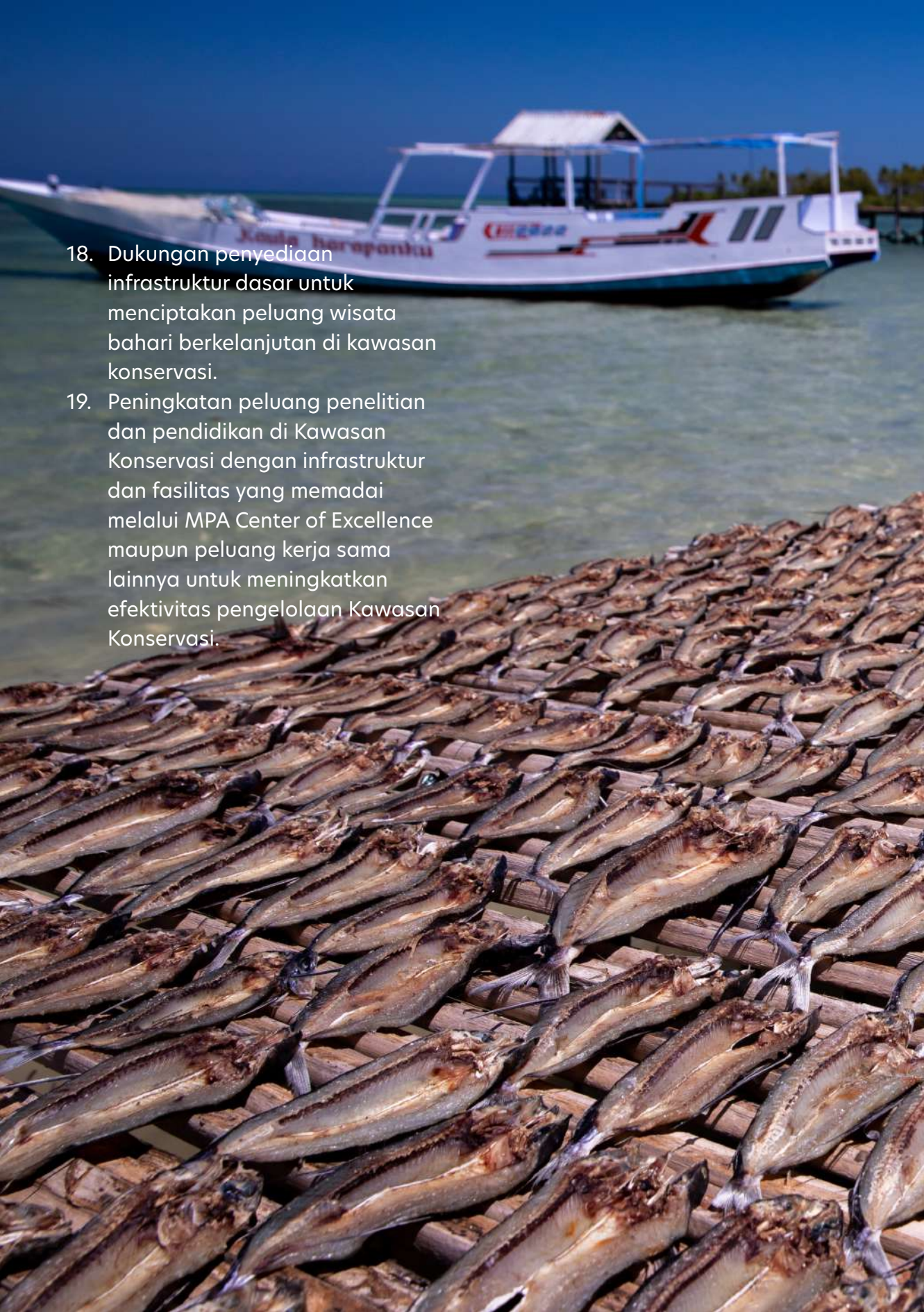
Untuk mencapai target tersebut langkah strategi yang harus dilakukan adalah:

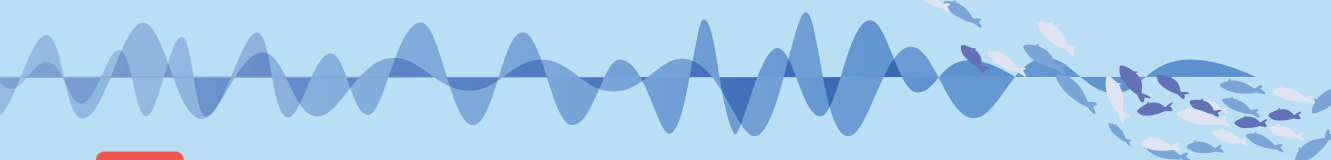
1. Penetapan proses sistematis bagi semua Kawasan Konservasi untuk menilai daya dukung

lingkungan, untuk memandu dan menginformasikan tingkat pemanfaatan berkelanjutan yang sesuai.

2. Pembangunan sistem dan teknologi yang efisien untuk patroli dan penegakan hukum secara kolaboratif di kawasan konservasi, dengan mengintegrasikan NSDL, VMS, AI, dan atau tagging use (Pemantauan berbasis tag) untuk pemantauan akurat, deteksi dini, serta memastikan keberlanjutan dan kepatuhan.
3. Optimasi implementasi SEAPARK untuk mendukung perizinan yang transparan, efisien, dan terkontrol dalam pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan
4. Penerapan konsep MPA for Fisheries (costal dan offshore fisheries) di kawasan konservasi untuk mendukung pemanfaatan berkelanjutan.
5. Pelibatan, pelatihan, dan mobilisasi penyuluh perikanan dan kelautan untuk mendukung implementasi kebijakan pemanfaatan berkelanjutan di kawasan konservasi.

- 
6. Integrasi praktik terbaik EAFM dalam desain dan pengelolaan zona perikanan berkelanjutan.
 7. Dukungan bagi pemerintah provinsi dalam penyediaan infrastruktur yang mendukung kepatuhan perikanan dan memberikan manfaat bagi nelayan.
 8. Pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi nelayan kawasan konservasi untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan meningkatkan mata pencaharian perikanan.
 9. Pengakuan kawasan konservasi dalam rencana dan dokumen perikanan serta kelautan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional.
 10. Penyediaan kerangka pemantauan dan evaluasi untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan di kawasan konservasi.
 11. Penyusunan pedoman dan peraturan terkait kegiatan akuakultur berkelanjutan di kawasan konservasi.
 12. Integrasi Akuakultur dengan Pendekatan Ekologi (ADPE) ke dalam rencana pengelolaan kawasan konservasi.
 13. Pembelajaran dan peningkatan kapasitas pembudidaya dalam pengelolaan kawasan konservasi dan mengoptimalkan mata pencaharian budi daya.
 14. Dukungan pemerintah provinsi untuk memastikan ketersediaan infrastruktur untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan budi daya dan mengoptimalkan aliran manfaat bagi para pembudidaya.
 15. Pengembangan dan adopsi pedoman wisata bahari berkelanjutan, kode etik dan program sertifikasi di kawasan konservasi.
 16. Pengembangan kriteria dan insentif yang jelas untuk investasi perusahaan dalam wisata bahari berkelanjutan di kawasan konservasi.
 17. Dukungan kepada masyarakat sekitar kawasan konservasi dalam mengakses peluang mata pencaharian dan mengembangkan usaha alternatif berbasis wisata bahari berkelanjutan.

- 
18. Dukungan penyediaan infrastruktur dasar untuk menciptakan peluang wisata bahari berkelanjutan di kawasan konservasi.
19. Peningkatan peluang penelitian dan pendidikan di Kawasan Konservasi dengan infrastruktur dan fasilitas yang memadai melalui MPA Center of Excellence maupun peluang kerja sama lainnya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi.



BIDANG KERJA 5 : PENDANAAN BERKELANJUTAN

Bidang kerja 5 menitikberatkan pada pengembangan, implementasi, dan replikasi mekanisme-mekanisme pembiayaan berkelanjutan perlu terus didorong untuk memperlihatkan dampaknya pada pengelolaan Kawasan Konservasi (KK). Target yang ingin dicapai antara lain:

- a. Penerapan Analisis Biaya-Manfaat (ABM) atau Cost-Benefit Analysis (CBA) sebagai alat ukur kebutuhan pembiayaan pengelolaan KK, dasar bagi strategi pendanaan, dan dasar pengambilan keputusan strategis untuk mendorong kolaborasi multi-pihak.
- b. Pengembangan SUOP menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga dapat mengeksplorasi sumber pendanaan untuk pengelolaan kawasan konservasi.
- c. Pengembangan skema kontribusi sektor swasta dalam pendanaan pengelolaan KK juga perlu dipertimbangkan.

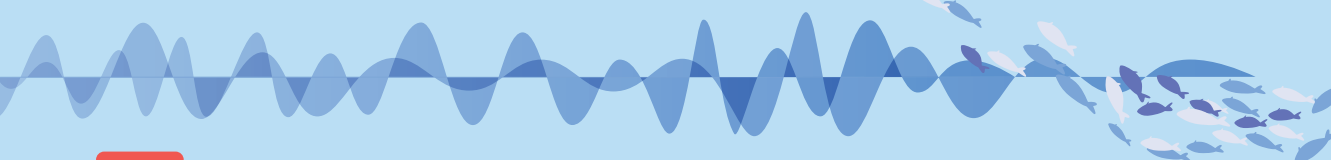
Untuk mencapai target tersebut langkah strategi yang harus dilakukan adalah:

1. Sosialisasi dan Koordinasi lintas Kementerian Lembaga secara berkala mengenai target, capaian, evaluasi, dan kesenjangan pengelolaan kawasan konservasi.
2. Memastikan pengelolaan kawasan konservasi masuk di dalam komponen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
3. Optimalisasi mekanisme-mekanisme pembiayaan dalam sistem keuangan pemerintah untuk pengelolaan kawasan konservasi.
4. Optimalisasi kontribusi PNBP dari sektor kelautan dan perikanan untuk pengelolaan kawasan konservasi.
5. Peningkatkan akses dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID) untuk pengembangan dan pengelolaan kawasan konservasi.
6. Meningkatkan penerapan mekanisme Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi (TAPE)



- dan Transfer Kabupaten Berbasis Ekologi (TAKE) dalam skema bantuan keuangan tahunan (bankeu).
7. Pengembangan skema-skema pendanaan inovatif untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.
 8. Pengembangan skema pengelolaan karbon biru di dalam kawasan konservasi sebagai alternatif pendanaan.
 9. Penyusunan Rencana Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (RPDLH) sektor Kelautan dan Perikanan. Penyusunan RPDLH mengacu pada Permen KP No. 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendanaan Program Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan.
 10. Implementasi mekanisme pembiayaan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
 11. Transformasi kelembagaan pengelola kawasan konservasi untuk menjalankan skema pendanaan campuran dan inovatif.
 12. Percontohan (piloting) perencanaan pendanaan pengelolaan kawasan konservasi.
 13. Peningkatan kemitraan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Bidang Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) dalam pengelolaan kawasan konservasi.
 14. Kajian skema atau model KPBU untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi.
 15. Sosialisasi skema KPBU kepada sektor swasta untuk mendukung pengelolaan KK secara berkala.





BIDANG KERJA 6 : UPAYA KONSERVASI BERBASIS KAWASAN YANG EFEKTIF LAINNYA – OECM

Bidang kerja 6 bertujuan untuk memberikan gambaran perkembangan terkini, langkah strategis, alur waktu, capaian kunci, dan pihak terkait yang terlibat dalam peta jalan OECM. Dalam dua tahun terakhir telah banyak inisiatif yang dijalankan di Indonesia, termasuk membuat definisi dan kriteria yang sesuai dengan konteks Indonesia. Bahkan untuk memudahkan pemahaman, dalam konteks Indonesia, OECM di kawasan perairan dinamakan Kawasan Perairan dengan Dampak Konservasi (KPKD). Dalam dokumen ini, target yang ingin dicapai selanjutnya adalah:

- a. Adanya definisi dan kriteria final KPKD yang memenuhi karakter dan konteks Indonesia.
 - b. Memperkuat landasan hukum bagi pengakuan KPKD di Indonesia.
 - c. Tersedianya panduan penyusunan KPKD untuk memastikan dipenuhinya kriteria dasar KPKD.
 - d. Tersedianya mekanisme kelembagaan dan pendampingan dalam pelaksana KPKD.
 - e. Terbangunnya model KPKD di berbagai daerah di Indonesia
- Untuk mencapai target tersebut langkah strategi yang harus dilakukan adalah:
1. Membangun landasan hukum yang lebih kuat bagi pengakuan KPKD di Indonesia seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, RZWP3K.
 2. Identifikasi dan menilai lokasi potensial KPKD.
 3. Membangun kolaborasi antara lembaga non-pemerintah dan pemerintah dalam membangun model KPKD di berbagai daerah di Indonesia.
 4. Pengembangan panduan untuk identifikasi, pembentukan, pengusulan, pengumpulan data dan penilaian efektivitas KPKD.
 5. Sosialisasikan dan bimbingan teknis tentang KPKD lebih lanjut kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
 6. Integrasi KPKD ke dalam dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah.
 7. Pengembangan model pendanaan, sebagai insentif finansial pembentukan dan pengelolaan KPKD.

BIDANG KERJA 7 : PLATFORM KOMUNIKASI DAN SOSIALISASI

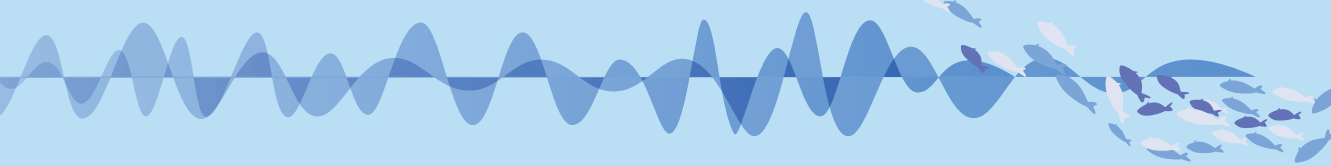
Bidang kerja 7 tujuan bertujuan untuk memperkuat komunikasi dalam mencapai tujuan-tujuan konservasi laut di Indonesia, dengan langkah-langkah strategis yang meliputi pengembangan strategi komunikasi, pembuatan platform, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Target yang ingin adalah:

- a. Penguatan SIDAko sebagai platform komunikasi dan interaksi utama bagi berbagai pihak yang berperan dalam pengembangan konservasi laut di Indonesia.
- b. Platform SIDAko menjadi sarana utama sosialisasi konservasi laut dan pusat informasi MPA dan OECM Vision 2045 yang mudah diakses oleh masyarakat.
- c. Penguatan SIDAko juga ditujukan untuk memastikan fungsinya sebagai clearinghouse yang komprehensif untuk seluruh kawasan konservasi, yaitu sistem manajemen informasi yang menangani pengelolaan data dan informasi secara terdistribusi.
- d. Penguatan koordinasi lintas lembaga diharapkan menjadi lebih baik dan efektif dengan ditunjuknya perwakilan KKP

dan lembaga-lembaga terkait untuk dilibatkan dalam Tim Inti Komunikasi dan Koordinasi.

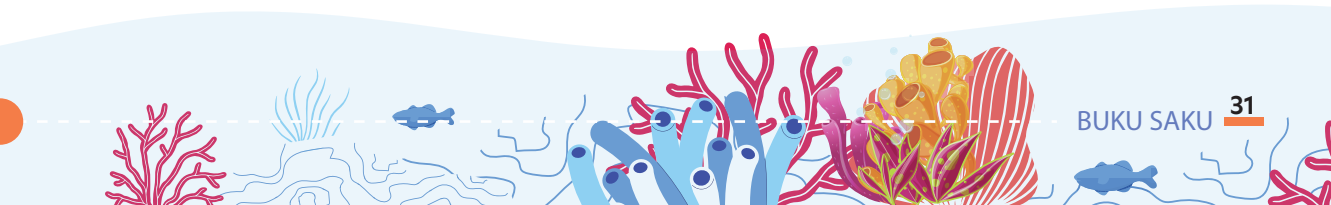
Langkah strategi yang harus dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:

1. Pembentukan Tim Inti Komunikasi dan Koordinasi.
2. Finalisasi Strategi Komunikasi.
3. Pengembangan Sarana Komunikasi.
4. Mengamankan Dukungan Lintas Lembaga.
5. Perluasan Fungsionalitas SIDAko.
6. Pembuatan Platform Komunikasi Publik Interaktif.
7. Sosialisasi Website Kementerian Kelautan dan perikanan kepada Wisatawan sebagai kampanye terfokus untuk meningkatkan kesadaran wisatawan akan situs web Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Kampanye yang Dipimpin Pemuda.
9. Mengorganisir Acara Khusus yang Terencana dengan Baik.
10. Penyajian Pencapaian Visi KKP dalam Konferensi Internasional dan Media.
11. Menjamin Keberlanjutan Platform.



SIDAKO

SISTEM DATABASE KONSERVASI





PENUTUPAN

Dokumen Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 merupakan instrumen penting bagi pemerintah Indonesia dan para pihak yang terlibat dalam pengembangan kawasan konservasi dan OECM di Indonesia. Dokumen ini memberikan gambaran tentang perlunya pemerintah Indonesia dan para pihak untuk melindungi wilayah lautnya, yang kemudian bermanfaat terhadap perlindungan keanekaragaman hayati, kepentingan perikanan, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Lebih lanjut, dokumen ini juga menjabarkan tentang strategi untuk mencapai Target 30x45, melalui (1) perluasan kawasan konservasi dan potensi OECM dan (2) peningkatan efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi melalui tujuh bidang kerja. Dengan demikian, Visi Kawasan Konservasi dan OECM 2045 dapat menjadi panduan strategis dan pondasi untuk mewujudkan pengelolaan laut berkelanjutan yang dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang.

Pencapaian perluasan dan efektivitas kawasan konservasi dan OECM di Indonesia pada tahun 2045 tentu tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Keberhasilan dalam memperluas kawasan konservasi dan OECM, serta meningkatkan efektivitas pengelolaannya, sangat bergantung pada kolaborasi yang erat antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. Sinergi antar pihak akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkelanjutan dan berkeadilan. Melalui semangat gotong royong dan tanggung jawab bersama, Indonesia dapat mewujudkan pengelolaan laut yang berkelanjutan dan menjadi contoh kepemimpinan global dalam perlindungan keanekaragaman hayati laut dan ketahanan iklim.



